



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2022), pp. 97-110

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24611

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Peran Marger Bank Syariah di Indonesia dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal*

Harisah Harisah,¹ Wasilatur Rohmaniyah²

Institut Agama Islam Negeri Madura



[10.15408/sjsbs.v9i1.24611](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24611)

Abstract

The Indonesian government has implemented a number of policies to assist the Islamic business sector in the country. One of these methods is to undertake a merger of Islamic financial institutions. This measure is a significant strategy, and it is the first in Indonesia, to increase people's preferences for sharia-compliant transactions while also advancing Indonesia's position as the world's leading Islamic banking. The following study was prepared using qualitative methods, including a review of the literature, and it used many government policies as the primary data in order to analyze the role of Islamic bank mergers in Indonesia, particularly in terms of meeting the demands of Indonesia's halal industry. It is discovered in this study that Indonesia's Halal Industry represents an opportunity to drive economic improvement in the community. This is due to a large number of consumers of halal products in Indonesia, combined with the potential of a very dominant community. As a result of this merger, financial institutions will be positioned as one of the forums for supporting the halal industry, particularly in the capital sector. In addition to providing a forum for industry players, the merger of Islamic banks provides a forum for the community to meet their needs through the development of financial inclusion, which is carried out by the banks that have merged, allowing people from all walks of life to easily access sharia-compliant banking services.

Keywords: Mergers; Islamic Bank; Halal industry

Abstrak

Dalam mendukung sektor ekonomi syariah di Indonesia ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan melakukan merger bank syariah. Tindakan ini merupakan strategi yang sangat besar dan pertama di Indonesia untuk mendorong preferensi masyarakat dalam bertransaksi sesuai syariah dan memajukan keuangan syariah Indonesia terdepan di dunia. Dengan demikian, kajian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan dan menjadikan beberapa kebijakan pemerintah sebagai data utama dalam menganalisa peran merger bank syariah di Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan industri halal di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa industri halal di Indonesia menjadi peluang penggerak peningkatan ekonomi di masyarakat, karena besarnya konsumen produk halal di Indonesia dengan potensi masyarakat yang sangat mendominasi sehingga lembaga keuangan dengan hasil merger ini menjadi salah satu wadah untuk mendukung industri halal terutama dalam sektor modal. Selain untuk pelaku industri, merger bank syariah juga menjadi wadah bagi

*Received: Dec 13, 2021, Revision: January 25, 2022, Published: February 4, 2022.

¹ **Harisah Harisah** adalah dosen Institut Agama Islam Negeri Madura, email; harisah@iainmadura.ac.id

² **Wasilatur Rohmaniyah** adalah dosen Institut Agama Islam Negeri Madura, email; harisah@iainmadura.ac.id

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan pengembangan inklusikeuangan yang dilakukan oleh bank yang sudah dimarger, sehingga semua lapisan masyarakat dengan mudah mendapatkan layanan bank syariah.

Keyword: Marger; Bank Syariah; Industri halal

A. PENDAHULUAN

Secara global, fenomena yang berkembang saat ini adalah terjadinya pergeseran preferensi masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk. Tidak hanya sebatas pada konsumsi makanan dan minuman, namun lebih meluas lagi pada hal pakaian (fishion), obat-obatan dan bahkan destinasi wisata. Bergesernya preferensi masyarakat kini menjadi lebih mempertimbangkan tidak hanya pada aspek kualitas produknya namun juga pada aspek kehalalannya. Realitanya, kebutuhan akan produk halal tidak hanya terjadi pada negara-negara yang berpenduduk muslim mayoritas, namun secara merata pada konsumen yang memiliki preferensi terhadap produk sehat dan berkualitas. Makanan halal diyakini sehat dan berkualitas secara otomatis. Namun makanan berkualitas belum tentu terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, preferensi produk halal bukan lagi hanya terbatas bagi ketentuan agama tertentu namun juga berlaku bagi konsumen yang peduli pada kualitas dan proses dari suatu produk.

Populasi masyarakat Muslim yang tersebar di berbagai negara merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi pengembangan industri halal. Dengan pasar konsumen muslim yang mencapai sekitar seperempat dari seluruh penduduk dunia, tak hanya negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, namun banyak negara dengan penduduk minoritas muslim pun turut berlomba memanfaatkan peluang besar industri halal tersebut.

State of the Global Islamic Economy Report 2019/20 (Driving The Islamic Economy Revolution 4.0) mengungkapkan: *'This year's Report estimates that Muslims spent US\$2.2 trillion in 2018 across food, pharmaceutical, and lifestyle sectors that are impacted by Islamic faith-inspired ethical consumption needs. This spending reflects a healthy 5.2% year-on-year growth and is forecasted to reach US\$ 3.2 trillion by 2024 at a Cumulative Annual Growth Rate ("CAGR") of 6.2%. In addition, Islamic finance assets were reported to have reached \$2.5 trillion in 2018.'*³ Laporan di atas menyiratkan bahwa Industri halal memiliki prospek yang sangat cemerlang di masa mendatang. Konsumen pada industri halal mengalami peningkatan sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran mencapai USD 2,2 triliun. Angka ini diprediksikan akan terus meningkat setiap tahunnya. Compound Annual Growth Rate (CAGR) memproyeksikan bahwa industri halal akan meningkat hingga 6,2% dalam kurun waktu 2018 sampai 2024. Konsumen industri halal menghabiskan total dana yang akan terus meningkat hingga mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tentunya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangan Industri halal. Ketersediaan produk halal merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat muslim Indonesia di tengah kecenderungan keagamaan masyarakat Indonesia yang

³ "State of the Global Islamic Economy Report 2019/20 (Driving The Islamic Economy Revolution 4.0)," 2021.

semakin meningkat saat ini. Kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal, fashion halal, obat-obatan halal dan destinasi wisata halal bagi masyarakat muslim merupakan bentuk nyata pengejawantahan nilai-nilai Islam yang dipercayainya. Dalam penelitiannya, Yasinta Ismailia menyimpulkan bahwa industri halal memiliki peluang besar di Indonesia karena tingginya kesadaran masyarakat muslim yang ingin hidupnya lebih sesuai dengan syariah.⁴ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bambang Brodjonegoro (Menteri PPN/KepalaBappenas) bahwa Indonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia, sekaligus menjadi produsen produk halal.⁵ Oleh karena itu, *demand* produk halal diprediksi akan terus semakin meningkat di pasar domestik pada masa-masa yang mendatang.

Masih mengacu pada hasil survey State of The Global Islamic Report (2019), Indonesia dengan skor 49 baru menduduki rangking ke-5 dalam kategori Top 15 Global Islamic Economy Indicator. Kemudian, jika dilihat dari sektor industri halal lainnya, Indonesia menduduki rangking ke-5 dalam Top 10 Islamic Finance, rangking ke-4 dalam Top 10 Muslim-Friendly Travel, serta rangking ke-3 dalam Top 10 Modest Fashion. Sementara itu, untuk sektor Halal Food, Media and Recreation dan Pharma and Cosmetics, posisi Indonesia belum masuk dalam 10 besar.⁶ Sebagai upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan industri halal di Indonesia, Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan Indonesia International Halal Seminar & Workshop yang dilaksanakan oleh Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) untuk mendorong perkembangan potensi industri syariah di Indonesia.⁷

Salah satu peran strategis Industri halal dalam meningkatkan perekonomian adalah bahwa setiap tahunnya industri halal berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,5 miliar. Selain itu Industri halal juga berkontribusi terhadap meningkatnya investasi dari investor asing sebesar 1 USD miliar serta membuka sebesar 127ribu lapangan pekerjaan setiap tahunnya. Jika terus dioptimalkan, Industri halal ini akan memberikan dampak positif dalam peningkatan nilai ekspor dan cadangan devisa negara. Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal. Dalam hal Ekspor, industri halal sangat berpeluang menambah nilai ekspor Indonesia. Nilai ekspor yang bisa dihasilkan dari industri halal berkisar pada USD 5,1 miliar hingga USD 11 miliar setiap tahunnya. Pada tahun 2018, industri halal telah

⁴ Yasinta Ismailia, *Pengaruh Gaya Hidup Syariah Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada KlinikKecantikan Muslimah Aishaderm* (Skripsi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, , Surabaya: Universitas Islam Negeri SunanAmpel, 2018), 90.

⁵ "Sambutan Menteri PPN/KepalaBappenas – Bambang Brodjonegorodalam Acara High Level Discussion Dengan tema 'Indonesia, Pusat Ekonomi Islam Dunia' Diselenggarakan Oleh Kementerian PPN/BappenasbekerjasamadenganIkatanSarjanaEkonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Di Gedung Bappenas, Menteng," (Jakarta., 2018), <http://mysharing.co/indonesia-berpotensi-menjadi-pasar-produk-halal-terbesar-di-dunia/>, 25 Juli 2018.

⁶ State of the Global Islamic Economy Report 2019/20 (Driving The Islamic Economy Revolution 4.0)

⁷ Anastasia Anggoro, "BI Dukung Indonesia International Halal Lifestyle'," 2018, Berita, <https://swa.co.id/swa/business-strategy/bi-dukung-indonesia-international-halal-lifestyle>, 25 September 2018.

menghasilkan USD 7,6 miliar. Indonesia memiliki *halal export opportunity* produk halal sebesar 3,8% secara global.⁸

Potensi ini dilihat dari sisi demand, dimana Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 260 juta jiwa dengan mayoritas muslim, 28 ribu pesantren, 59,7 % penduduk milenial dan memiliki ponsel 133%. Sedangkan dari sisi penawaran, Indonesia memiliki 14 Bank Umum Syariah, 20 unit Usaha Syariah, 164 Bank Syariah Desa, dan sekitar 4500 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (seperti Baitul Mal wat Tamwil/BMT). Lembaga keuangan syariah sangat berperan dalam pengembangan industri halal. Perbankan syariah yang merupakan lembaga intermediary memiliki andil melalui kegiatan penyaluran dananya untuk menumbuhkan gerakan masyarakat sadar halal kepada para nasabah dan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian industri halal menjadi sebuah ekosistem halal (dari hulu hingga kehilir) yang sempurna.

Yustati mengemukakan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk pengembangan sektor halal, antara lain: menjalin Kerjasama dengan perusahaan yang mengeluarkan produk dengan label halal; mengembangkan *sharia card* atau kartu debit syariah untuk mempermudah turis/wisatawan mengakses tempat wisata syariah; memberikan pembiayaan bagi pengusaha bidang pariwisata syariah, fashion, maupun produk farmasi untuk mengembangkan bisnisnya.⁹ Selain itu, pengembangan industri halal tentu perlu mendapat dukungan dalam hal penguatan aspek hukum dan koordinasi. Salah satu regulasi yang memiliki pengaruh besar adalah peraturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pada tanggal 22 Juni 2021 pada acara closing ceremony Webinar Halal Festival Syawal LPPOM MUI, LPPOM MUI secara resmi menyerahkan ketetapan halal pada BPJPH Kemenag. Hal itu didasarkan pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP 39/2021 ini mengamanahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di Indonesia yang salah satu kewenangannya adalah menerbitkan dan mencabut sertifikat halal atas suatu produk. PP tersebut juga mengatur bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk biologi, produk kimiawi hingga produk rekayasa genetic wajib bersertifikat halal. Dengan terbitnya BPJPH ini diharapkan akan mendorong peningkatan sertifikasi halal sehingga dapat memberikan efek domino bagi perkembangan industri halal di Indonesia.

Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia belum menjadi pemain utama dalam industri halal secara global, khususnya produk makanan dan minuman, adalah karena produk-UMKM pada umumnya belum bersertifikat halal. Padahal, Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,1 juta. Sebagai upaya memperkuat daya saing UMKM adalah dengan sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal UMKM akan memiliki

⁸ "Indonesia Halal Lifestyle Center 2019.," 2020, <https://www.idhalalcenter.org>.

⁹ Herlina Yustati and DisfaLidian Handayani, "Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal," *Jurna LBaabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.2 No.1 (April 2017).

nilai tambah, karena memiliki potensi pasaran lebih luas hingga ke pasar global. Oleh karena itu efektifitas sertifikasi halal menjadi sangat urgen. Adanya sistem informasi yang memadai dalam upaya mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses informasi terkait halal, khususnya sertifikat halal. Kabar baiknya, selama tahun 2020 BPJPH Kemenag-LPPOM MUI berhasil mengeluarkan sertifikat halal 3251 UMK.¹⁰ Dalam rangka efektifitas sertifikasi halal pula, lebih lanjut akan didirikan halal center dan lembaga penjamin halal di seluruh Indonesia yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, misalnya lain perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah terkait. Mereka memiliki peran yang sangat urgen dalam pengembangan industri halal khususnya sebagai penyambung antar pemangku kepentingan industri halal. Beberapa instrumen tersebut akan maksimal dalam pelaksanaannya jika didukung dengan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam memberikan permodalan masyarakat dalam seluruh lapisan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, yaitu bahan-bahan strategi manajemen yang mengikat yang terdiri dari teori-teori manajemen, keputusan manajemen, dan pendapat dan sumber data sekunder. Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis yang bersifat deskriptif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Mega Marger Bank Syariah di Indonesia

Kemajuan bank syariah di Indonesia telah ditandai dengan bentuk rencana mega merger bank syariah badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini menjadi tujuan negara untuk dijalankan demi tercapainya keuangan tanpa riba di seluruh lapisan masyarakat. Mega merger bank syariah merupakan merger dari bank mandiri syariah, bank BRI syariah, dan bank BNI syariah yang dicanangkan akan beroperasi pada february 2021. Penggabungan bank syariah BUMN menjadi penting untuk memaksimalkan potensi keuangan syariah yang ada saat ini. Sesuai dengan pernyataan Eko bahwa Hal ini merupakan momentum bersejarah dan juga merupakan tonggak sejarah kedua terhadap proses islamisasi sistem perbankan di Indonesia, mega merger bank syariah sangat bagus karena bisa menyatukan tiga bank syariah terbaik di Indonesia menjadi satu bank syariah yang besar dan bisa memiliki asset lebih dari 200 T, dan bahkan bisa masuk 10 besar bank syariah di dunia.

Tantangan yang dihadapi oleh bank syariah sering kali berputar dari permodalan, maka rencana mega merger bank syariah BUMN menjadi vital untuk dijalankan oleh negara. Sesuai dengan pernyataan Nur Rohim Yunus bahwa Mega

¹⁰ "Sertifikat Halal Kemenag," 2021, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/06/22/bpjph-kemenag-lppom-mui-berhasil-keluarkan-sertifikat-halal-3251-umk-di-tahun-2020>.

merger bank syariah sangat baik untuk membangun jaringan bank yang lebih luas, selain memperkuat kemitraan sesama bank syariah (Nur Rohim Yunus, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta dan Pengasuh Pondok Pesantren Darun Na'im Yapia Bogor, November 11, 2020). Mega merger bank syariah memberi harapan agar asset bank syariah semakin besar, dan bisa menjangkau lapisan masyarakat untuk bisa akses layanan bank syariah semakin luas (Dr. Binti Nur Asiyah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, November 13, 2020). Selain merger bank syariah disebut sebagai memperkuat lembaga syariah dalam negeri, hal ini juga sebagai upaya agar lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam bersaing secara global.

Mega merger sangat penting untuk memperluas pangsa bank syariah, yang saat ini sangat didukung oleh pemerintah seperti wakil presiden K.H. Ma'ruf Amin, beliau juga merupakan santri sehingga pengetahuan tentang konsep kajian fikih yang terintegritas dengan bank syariah saat menguasai. Dr. Taufik Hidayat, M.Ec Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS, "Seminar Nasional Online "Mega Merger Bank Syariah BUMN: Peluang Dan Tantangan Penguatan Bank Syariah Di Indonesia.," November 7, 2020. Pemerintah sangat mendukung pengembangan bank syariah dengan adanya mega merger maka masyarakat terutama lembaga pendidikan Islam seharusnya sudah menggunakan jasa keuangan yang berbasis syariah, kajian ekonomi syariah haruslah dijalankan dan diadakan sehingga masyarakat memahami tentang hukum dari bank syariah seperti kajian yang dilakukan dalam DSN-MUI Institut, yang dilakukan tiap minggu. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan keuangan syariah (Ah. Azharuddin Lathif, Ketua DSN-MUI Institut, "Seminar Nasional Online "Mega Merger Bank Syariah BUMN: Peluang Dan Tantangan Penguatan Bank Syariah Di Indonesia.," n.d). Dengan adanya merger bank syariah juga mendorong inklusifitas bank syariah (Syarifah Gustiawati Mukri, Pengasuh Pondok Pesantren Modern Darunnaim Yapia Parung Bogor, November 17, 2020).

Keadaan inilah yang memicu para tokoh agama untuk memanfaatkan kedudukannya menghimbau masyarakat agar semua masyarakat turut serta menggunakan bank syariah. Peran para tokoh agama bisa dijalankan dengan beberapa metode misalnya merevitalisasi lembaga pendidikan yang dipimpin kyai untuk ikut serta mempelajari ekonomi syariah serta menggunakan segala bentuk transaksi lembaga melalui bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

Peluncuran mega merger bank syariah merupakan upaya untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia serta memperkuat baik skala nasional bahkan skala internasional, karena mega merger bank syariah menjadi wadah penggabungan antara bank mandiri syariah, BRI Syariah dan BNI syariah yang akan memperkuat permodalan bank syariah dengan tujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.¹¹ Sistem keuangan syariah sangat vital dalam perkembangan perekonomian nasional, yang memiliki fungsi untuk menyediakan produk

¹¹ Ferry Jie, Harisah-Harisah, and Zubaidi Sulaiman, "Acceleration of Mega-Merger of SOE Sharia Banks in Indonesia through Revitalization of Sharia Economic Law in Islamic Boarding Schools," *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 4, no. No.2 (2019): 50.

pembayaran, menyediakan sarana pembiayaan, tempat penukaran alat pembayaran dan segala bentuk wadah tabungan.¹²

2. Kemajuan Industri Halal dengan adanya Merger Bank Syariah

Beberapa industri halal di Indonesia menjadi trend dan kemajuan aplikasi konsep syariah dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang makanan. Mengonsumsi makanan dan minuman halal bagi seorang muslim merupakan kebutuhan dasar. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani tetapi sekaligus juga kebutuhan rohaninya. Sejalan dengan pertumbuhan populasi Muslim, permintaan untuk komoditas halal terus meningkat. Data Global Islamic Economy Report 2018/2019 menyebutkan bahwa makanan dan minuman memegang saham terbesar di global halal industri. Nilainya USD 1,303 miliar. Makanan dan minuman halal diproyeksikan akan tumbuh mencapai USD 1,863 miliar pada tahun 2023. Pada tahun 2019, Indonesia mengonsumsi USD 173 miliar untuk produk makanan halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia.¹³

Salah satu wujud dukungan pemerintah penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*) yaitu dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai amanat dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH ini diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan berkedudukan di bawah Kementerian Agama. Dengan adanya pembentukan BPJPH ini berarti telah mentransformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia yang pada mulanya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi suatu kewajiban (*mandatory*). Hal ini dilakukan dalam upaya member keamanan dan kenyamanan kepada konsumen muslim, khususnya industri makanan halal, serta menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan mendistribusikan produk-produk halal, mengingat potensi pasar produk halal dalam negeri yang sangat besar.

Selain kebutuhan berupa makanan, Indonesia juga memiliki industri halal seperti pakaian yang dikenal dengan fishion. Periode awal fishion muslim di Indonesia dimulai sekitar tahun 2010, dimana pada saat itu bermunculan beberapa desainer busana Muslim. Dalam 10 tahun terakhir, deretan nama desainer seperti Ria Miranda, Dian Pelangi, Rani Hatta, Jenahara, Si.Se.Sa, Vivi Zubedi dan Restu Anggraini tentu sangat dikenal di dunia fishion muslim Indonesia. Mereka merupakan desainer muda yang ikut andil dalam mempopulerkan busana muslim baik skala nasional maupun internasional. Seiring berjalannya waktu, permintaan terhadap fishion Muslim semakin berkembang dengan berbasis komunitas yang konsen terhadap industri fishion Muslim sebagai salah satu industri yang menggambarkan gaya hidup halal.

¹² Ahmad Mukri Aji, Harisah, and Syarifah Gustiawati Mukri, "Revitalization of Fintech Era 4.0 in the Development of Islamic Microfinance Institutions (IMFs)," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 150, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/15072/pdf>.

¹³ "State of the Global Islamic Economy Report 2019/20 (Driving The Islamic Economy Revolution 4.0)."

Data Focus Economy Outlook 2020 menyebutkan bahwa ekonomi kreatif menyumbang sebesar Rp1.100 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sepanjang 2020. Kontribusi masing-masing sub sektor itu adalah 41 persen untuk kuliner, fashion berkontribusi sebesar 17 persen dan kriya sebesar 14,9 persen. Tiga sub sektor ini juga memiliki nilai ekspor terbesar yakni fashion US\$11,9 miliar, kriya US\$6,4 miliar, dan kuliner US\$1,3 miliar.¹⁴

Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy Report 2019/2020, mengungkapkan bahwa Indonesia berada pada posisi ranking ketiga kategori negara yang mengembangkan fashion muslim terbaik di dunia setelah Uni Emirat Arab dan Turki. Laporan ini sekaligus juga mengungkapkan, nilai konsumsi fashion muslim dunia mencapai US\$ 283 miliar, di mana konsumsi fashion muslim Indonesia mencapai US\$ 21 miliar.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk terus menggenjot industri fashion ini adalah dengan menyelenggarakan berbagai pagelaran/pertunjukan fashion untuk memperkenalkan variasi produk industri fashion Muslim baik skala nasional maupun Internasional. Di antaranya adalah Indonesian Muslim Fashion Week, the International Indonesian Islamic Fashion Fair, Muslim Fashion Festival Indonesia, dan Modest Fashion Summit. Pagelaran busana berskala internasional ini menjadi ajang pameran untuk memperkenalkan berbagai produk industri fashion Muslim Indonesia kepada para pemangku kepentingan bidang fashion Muslim pada level global.

Meskipun industri fashion telah menunjukkan potensinya yang sangat cerah, namun ada pula berbagai tantangan kedepan yang harus dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal adalah mengenai ketersediaan bahan baku. Bahan baku tekstil jenis katun Indonesia masih dipasok dengan mengimpor dari negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat. Menurut Kementerian Perindustrian, Indonesia mengimpor kapas sebagai bahan baku/kain katun mencapai 99,2 persen dari semua kebutuhan kapas nasional per tahun. Tantangan selanjutnya adalah pada alat/mesin produksi, dimana masyarakat masih banyak yang menggunakan alat tenun tradisional sehingga hasilnya sangat terbatas dan proses produksinya memakan waktu lama. Selain tantangan di atas, tantangan terbesar dari pengusaha fashion, terutama industri kecil dan menengah, adalah perihal permodalan, di mana Industri Kecil Menengah (IKM) cenderung sulit untuk menjamin permodalan mereka karena bunga yang terlalu tinggi dari bank.

Pengembangan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap industri halal begitu melonjak terutama bagi para pemeluk Islam. Saat ini tidak hanya pada kebutuhan pokok keadaan masyarakat untuk menyempurnakan kebutuhan hidupnya sudah beranjak pada pemanjaan diri yaitu dengan adanya jadwal kunjung pada tempat wisata-wisata. Wisata dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan memanjaan diri juga merupakan kebutuhan intelektual. Sehingga pada sektor wisata halal tahun 2019 Indonesia dan Malaysia secara bersamaan menempati urutan pertama sebagai destinasi wisata halal (*halal tourism*) terbaik dengan skor 78, mengungguli 130 destinasi

¹⁴ "Ekonomi Kreatif," 2021, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/377881/ekonomi-kreatif-sumbang-pdb-hingga-rp1100-t>.

lainnya di seluruh dunia. Ada empat criteria penilaian yang digunakan untuk mendapatkan posisi tersebut meliputi *access, communication, environment, dan services* (ACES). Posisi Indonesia ini meningkat secara konsisten dari tahun-tahun sebelumnya di mana pada tahun 2018 Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) menempati peringkat kedua. Pada 2017 Indonesia menempati peringkat ke3, tahun 2016 peringkat ke-4, dan tahun 2015 peringkat ke-6.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal, karena setidaknya memiliki 2 faktor pendukung yaitu faktor internal dan eksternal.¹⁵ Adapun faktor internal adalah keberagaman sumber daya alam dan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam sebanyak 87 persen dari total populasi. Kemudahan, Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.508 pulau. Wilayah pesisir itu sudah pasti memiliki potensi wisata yang menjadi daya tarik. Kekayaan budaya juga merupakan potensi besar untuk mengembangkan industri pariwisata halal. Dialog yang harmonis antara keragaman budaya yang khas dengan nilai-nilai keislaman yang moderat dapat mendukung kemajuan pariwisata halal di Indonesia. Sedangkan faktor eksternal meliputi laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) yang diterbitkan pada April 2018 lalu, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki beberapa destinasi wisata yang ramah Muslim. Kemudian, masih menurut laporan GMTI beberapa industri pariwisata halal di Indonesia memperoleh penghargaan di ajang World Halal Tourism Awards 2016. Dari 16 kategori yang dikompetisikan, Indonesia berhasil memenangkan 12 kategori. Selanjutnya dapat dilihat dari kunjungan wisatawan. Perkembangan jumlah wisatawan global yang berkunjung ke Indonesia selama 5 tahun terakhir (2014-2018) yang semakin meningkat.

Gaya hidup yang semakin kompleks juga menuntut adanya pengembangan produk kecantikan yang semakin terutama bagi kaum wanita karena bagi sebagian kaum wanita. Produk kosmetik merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih bagi perempuan yang memiliki pekerjaan atau karir di sektor publik. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri kosmetik nasional mengalami pertumbuhan 20% atau sebesar empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Industri kosmetik dalam negeri secara kuantitas bertambah 153 perusahaan pada tahun 2017, sehingga pada saat ini jumlah totalnya mencapai lebih dari 760 perusahaan. Salah satu brand ternama yang telah mengunci pasar industri kosmetik halal di Indonesia adalah Wardah. Wardah telah berhasil menjadikan "halal" sebagai jargon utamanya untuk meraih pangsa pasar yang juga didukung oleh halal fashion melalui jargon hijab berbagai endorsernya.

Kementerian Perindustrian telah menetapkan farmasi dan kosmetik pada daftar sektor industri andalan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, karena sejak tahun 2013 hingga 2017 pangsa pasar produk farmasi mengalami kenaikan namun performa penjualannya menurun. *Euromonitor Consumer Health in*

¹⁵ "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," 2021.

Indonesia Country Report 2017 mengungkapkan pangsa pasar sektor farmasi pada tahun 2019 mencapai Rp 55,874.9 miliar. Pertumbuhan ini terjadi pada produk analgesik, vitamin, produk herbal dan suplemen makanan. Produk vitamin dan suplemen makanan menyumbang hampir lima puluh persen dari seluruh penjualan produk kesehatan selama 2017. Beberapa faktor yang diyakini sebagai penyebab peningkatan konsumsi produk vitamin dan suplemen diantaranya adalah karena perubahan cuaca yang tidak menentu akibat pemanasan global dan meningkatnya jumlah pekerja produktif di Indonesia sehingga konsumsi vitamin dan suplemen sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan.

Berdasarkan data *State of Global Islamic Report*, secara global konsumsi muslim terhadap produk farmasi dan kimia pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan. Pada kluster produk kosmetik, Indonesia menempati posisi kedua setelah India sebagai negara dengan konsumsi terbesar dan diprediksi pangsa pasar kosmetik ini akan naik 6.9 persen menjadi USD 90 miliar di tahun 2023. Sedangkan pada kluster produk farmasi Indonesia berada di posisike 4 sebagai negara terbesar konsumsi terbesar, dan pada tahun 2023 diperkirakan pangsa pasarnya akan naik 7.1 persen menjadi USD 131 miliar.

Di Indonesia setidaknya ada 10 rumah sakit yang dikategorikan rumah sakit Syariah. Rumah sakit tersebut tersebar di wilayah pulau Jawa, yaitu RS Islam Sultan Agung Semarang, RS Nur Hidayah Bantul, Yogyakarta RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, RS Sari Asih Arrahmah Tangerang, RS Sari Asih Ciledug, RS Amal Sehat Wonogiri, RS Islam Yogyakarta PDHI, RS Muhammadiyah Lamongan dan RS PKU Yogyakarta. Kategori ini ditetapkan karena RS tersebut telah memenuhi standar pelayanan sesuai Syariah. Sejak tahun 2016, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pedoman pelaksanaan rumah sakit Syariah. Fatwa ini menjadi salah satu pedoman dan rujukan bagi rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat Syariah. Salah satu indikator rumah sakit bersertifikat Syariah adalah penggunaan obat-obatan yang halal, sehingga permintaan obat-obatan yang telah bersertifikat halal juga menjadi semakin meningkat.

Yustati mengemukakan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk pengembangan sektor halal, antara lain: menjalin Kerjasama dengan perusahaan yang mengeluarkan produk dengan label halal; mengembangkan *sharia card* atau kartu debit syariah untuk mempermudah turis/wisatawan mengakses tempat wisata syariah; memberikan pembiayaan bagi pengusaha bidang pariwisata syariah, fashion, maupun produk farmasi untuk mengembangkan bisnisnya.¹⁶ Selain itu, pengembangan industri halal tentu perlu mendapat dukungan dalam hal penguatan aspek hukum dan koordinasi. Salah satu regulasi yang memiliki pengaruh besar adalah peraturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pada tanggal 22 Juni 2021 pada acara closing ceremony Webinar Halal Festival Syawal LPPOM MUI, LPPOM MUI secara resmi menyerahkan ketetapan halal pada

¹⁶ Herlina Yustati and DisfaLidian Handayani, “Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal.”

BPJPH Kemenag. Hal itu didasarkan pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP 39/2021 ini mengamanahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal di Indonesia yang salah satu kewenangannya adalah menerbitkan dan mencabut sertifikat halal atas suatu produk. PP tersebut juga mengatur bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produkbiologi, produk kimiawi hingga produk rekayasa genetic wajib bersertifikat halal. Dengan terbitnya BPJHP ini diharapkan akan mendorong peningkatan sertifikasi halal sehingga dapat memberikan efek domino bagi perkembangan industri halal di Indonesia.

Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia belum menjadi pemain utama dalam industri halal secara global, khususnya produk makanan dan minuman adalah karena produk-UMKM pada umumnya belum bersertifikat halal. Padahal, Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,1 juta. Sebagai upaya memperkuat daya saing UMKM adalah dengan sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal UMKM akan memiliki nilai tambah, karena memiliki potensi pasaran lebih luas hingga ke pasar global. Oleh karena itu efektifitas sertifikasi halal menjadi sangat urgen. Adanya system informasi yang memadai dalam upaya mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses informasi terkait halal, khususnya sertifikat halal. Kabar baiknya, selama tahun 2020 BPJPH Kemenag-LPPOM MUI berhasil keluarkan sertifikat halal 3251 UMK.¹⁷ Dalam rangka efektifitas sertifikasi halal pula, lebih lanjut akan didirikan halal center dan lembaga penjamin halal di seluruh Indonesia yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, misalnya lain perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah terkait. Mereka memiliki peran yang sangat urgen dalam pengembangan industri halal khususnya sebagai penyambung antar pemangku kepentingan industri halal.

3. Dampak Pandemi covid 19 terhadap Pengembangan Industri Halal

Seperti yang diketahui, pandemi covid 19 yang menyebar secara global sejak 2019 telah membawa dampak multi dimensi. Saat ini kita telah dipaksa masuk ke dalam era New Normal yang telah membuat pola kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi mengalami berbagai perubahan, yang ditandai dengan semakin meningkatnya kewaspadaan khususnya dalam berinteraksi sosial. Hal tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi di seluruh dunia, di mana aktivitas perdagangan menurun, sedangkan ketidakpastian di pasar keuangan terus meningkat. Kondisi ini telah menghambat pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan berkontraksi 4,4% pada tahun 2020.¹⁸ Di tengah fenomena global tersebut perekonomian Indonesia tumbuh berkontraksi -2,07% dibandingkan tahun 2019. Ini merupakan pertumbuhan yang terendah sejak peristiwa krisis moneter 12 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1998.

¹⁷ "Sertifikasi Halal Kemenag,," 2021, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/06/22/bpjph-kemenag-lppom-mui-berhasil-keluarkan-sertifikat-halal-3251-umk-di-tahun-2020>.

¹⁸ "IMF World Economic Outlook EdisiOktober 2020,," 2021.

Sepanjang tahun 2020, konsumsi masyarakat muslim menurun cukup signifikan dan diperkirakan akan menyebabkan ekonomi dan keuangan syariah global terkontraksi sebesar -8,1%, hingga mencapai 1,86 triliun dolar AS dari 2,02 triliun dolar AS pada 2019.¹⁹ Dalam tataran ekonomi dan keuangan syariah global, sektor yang terdampak paling besar adalah sektor pariwisata ramah muslim (PRM) yang secara tahunan terkontraksi sebesar 70%, diikuti oleh sektor fashion muslim yang terkontraksi sebesar -2,9%. Sementara sektor makanan halal diperkirakan akan mengalami kontraksi yang terkecil, yaitu sebesar -0,2%. Hal yang hampir sama juga dialami oleh ekonomi dan keuangan syariah nasional, meski dengan kontraksi yang lebih moderat, bahkan sektor makanan halal nasional tetap tumbuh positif hingga 1,58%.

Upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 dilakukan melalui berbagai sumber pembiayaan, di mana industri Perbankan Syariah masih berdaya tahan dengan penyaluran pembiayaan mencapai pertumbuhan 8% pada tahun 2020 meskipun dalam masa pandemi covid 19, lebih tinggi dari industri perbankan secara total yang terkontraksi sebesar -2,41%.²⁰ Ini menunjukkan bahwa pemulihan dan peningkatan kembali usaha syariah dalam sektor prioritas ekonomi syariah dari dampak pandemi Covid-19 membutuhkan dukungan pembiayaan dari sektor keuangan Syariah.

Inilah momentum yang tepat bagi perbankan syariah dalam menguatkan identitasnya di industri perbankan dengan imej yang dimilikinya; resilient, memiliki daya saing tinggi, dan berperan lebih nyata pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia. Peran perbankan syariah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional harus terus ditingkatkan sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Perbankan syariah merupakan motor penggerak yang berperan sebagai penghubung berbagai sektor, seperti sektor riil, keuangan komersial, keuangan sosial, dan sektor keagamaan pada ekosistem ini, sehingga sinergi dan semangat berjamaah dapat terbangun dengan baik.

Dalam upaya penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*) pada semua sektor, perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung permodalan agar industri halal mampu bersaing dalam menciptakan berbagai produk halal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar dan dapat diterima oleh pasar domestic maupun global. Hal ini mengingat belum mampunya Indonesia masuk 5 besar negara produsen halal dunia. Saat ini negara pengeksport daging halal terbesar di dunia adalah Brazil, Australia, Sudan, India, dan Turki. Sedangkan untuk produk farmasi pengeksport terbesar di dunia antara lain Jerman, Prancis, Amerika Serikat, India, dan Inggris. Serta, untuk pengeksport kosmetik halal terbesar di dunia diantaranya adalah Perancis, UAE, Jerman, Amerika Serikat, dan China.

¹⁹ "State of the Global Islamic Economy Report 2019/20 (Driving The Islamic Economy Revolution 4.0)."

²⁰ "Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia 2020 (LEKSI)," 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LEKSI_2020_31032021.pdf.

Dengan penguatan permodalan yang dilakukan oleh perbankan Syariah terhadap Industri halal, diharapkan kemudian agar Indonesia tidak hanya sebagai pasar industri halal yang konsumtif, namun Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan berbagai peluang yang ada untuk menjadi negara produktif di bidang industri halal, sehingga Indonesia secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus membuka peluang di sektor ekonomi untuk masyarakat Indonesia dengan seluas-luasnya. Maka keberadaan bank syariah dengan adanya merger dan membentuk bank syariah Indonesia akan mendorong tumbuhnya industri halal yang memadai karena kehalalannya juga didukung dari pembiayaan yang sesuai syariah.

D. KESIMPULAN

Kajian ini menemukan bahwa merger bank syariah merupakan salah satu terobosan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah berupa bank syariah baik dari sektor permodalan, manajemen, serta penyerapan sumber daya manusia. Merger bank syariah ini merupakan penggabungan tiga bank yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) yang kemudian disatukan dalam semua segmennya menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini memperkuat permodalan bank syariah dan memperluas sektor pemasarannya, sehingga dalam mendukung pengembangan industri halal di Indonesia sangat signifikan dengan tujuan pemerintah yang menginginkan Indonesia menjadi pusat Halal dunia. Peran BSI untuk mendukung industri halal di Indonesia bisa dilakukan dengan produk pembiayaan yang memadai untuk masyarakat baik bagi industri kecil, menengah, dan industri yang sudah maju. Karena adanya industri halal tidak hanya dalam proses produk, pemasaran, dan penjualan akan tetapi aspek permodalan industri juga harus sesuai syariah sehingga adanya perluasan bank syariah akan memberikan inklusi keuangan syariah yang memadai bagi industri halal di masyarakat.

REFERENSI:

- Aji, Ahmad Mukri; Harisah, and Syarifah Gustiawati Mukri. "Revitalization of Fintech Era 4.0 in the Development of Islamic Microfinance Institutions (IMFs)." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/15072/pdf>.
- Anggoro, Anastasia. "'BI Dukung Indonesia International Halal Lifestyle,'" 2018. Berita, <https://swa.co.id/swa/business-strategy/bi-dukung-indonesia-international-halal-lifestyle>, 25 September 2018.
- Asiyah, Binti Nur. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, November 13, 2020.
- Lathif, Ah. Azharuddin. Ketua DSN-MUI Institut. "Seminar Nasional Online "Mega Merger Bank Syariah BUMN : Peluang Dan Tantangan Penguatan Bank Syariah Di Indonesia.," n.d.

- Hidayat, Taufik. Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKSn. "Seminar Nasional Online "Mega Merger Bank Syariah BUMN : Peluang Dan Tantangan Penguatan Bank Syariah Di Indonesia.," November 7, 2020.
- "Ekonomi Kreatif," 2021. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/377881/ekonomi-kreatif-sumbang-pdb-hingga-rp1100-t>.
- Jie, Ferry; Harisah-Harisah, and Zubaidi Sulaiman. "Acceleration of Mega-Merger of SOE Sharia Banks in Indonesia through Revitalization of Sharia Economic Law in Islamic Boarding Schools." *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 4, no. No.2 (2019).
- Yustati, Herlina; and DisfaLidian Handayani. "'Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal.'" *Jurna LBaabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.2 No.1 (April 2017).
- "IMF World Economic Outlook Edisi Oktober 2020.," 2021.
- "Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia 2020 (LEKSI)," 2021. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LEKSI_2020_31032021.pdf.
- "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional," 2021.
- Nur Rohim Yunus. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Jakarta dan Pengasuh Pondok Pesantren Darun Na'im Yapiya Bogor, November 11, 2020.
- "Sambutan Menteri PPN/Kepala Bappenas – Bambang Brodjonegoro dalam Acara High Level Discussion Dengan Tema 'Indonesia, Pusat Ekonomi Islam Dunia' Diselenggarakan Oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Di Gedung Bappenas, Menteng." Jakarta., 2018. <http://mysharing.co/indonesia-berpotensi-menjadi-pasar-produk-halal-terbesar-di-dunia/>, 25 Juli 2018.
- "Sertifikasi Halal Kemenag.," 2021. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/06/22/bpjph-kemenag-lppom-mui-berhasil-keluarkan-sertifikat-halal-3251-umk-di-tahun-2020>.
- "Sertifikat Halal Kemenag," 2021. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/06/22/bpjph-kemenag-lppom-mui-berhasil-keluarkan-sertifikat-halal-3251-umk-di-tahun-2020>.
- "State of the Global Islamic Economy Report 2019/20 (Driving The Islamic Economy Revolution 4.0)," 2021.
- Syarifah Gustiawati Mukri. Pengasuh Pondok Pesantren Modern Darunnaim Yapiya Parung Bogor, November 17, 2020.
- Ismailia, Yasinta. *Pengaruh Gaya Hidup Syariah Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Klinik Kecantikan Muslimah Aishaderm*. Skripsi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.